

**PENCABUTAN IJIN TERBIT KORAN INDONESIA RAYA TAHUN 1974****MUJIANI WIJAYANINGRUM**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
 Universitas Negeri Surabaya  
 E-mail: [anny\\_wijayaningrum@yahoo.com](mailto:anny_wijayaningrum@yahoo.com)

**Corry Liana**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
 Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Kebebasan berpendapat di Indonesia masa Orde Baru belum terwujud sepenuhnya, pers nasional masih hidup dalam bayang-bayang pemerintah. Bayang-bayang tersebut adalah pencabutan ijin terbit bagi setiap penerbitan yang dianggap menentang pemerintah. Kebijakan pers awal pemerintahan Orde Baru menjadikan pers sebagai *partner* untuk menumbangkan kekuasaan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang kemudian wajah pers berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan penguasa Orde Baru.

Secara umum penelitian ini membahas tentang: 1) berita-berita yang ditulis oleh koran *Indonesia Raya* masa Orde Baru tahun 1973-1974; 2) kebijakan pers yang diterapkan masa Orde Baru; 3) alasan dicabutnya ijin terbit koran *Indonesia Raya* tahun 1974. Berdasarkan hasil analisis sumber menunjukkan bahwa perkembangan kehidupan pers dipengaruhi oleh kontrol pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dapat berubah sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut. Surat kabar *Indonesia Raya* masa Orde Baru mengalami satu kali pencabutan ijin terbit yang bersifat fatal. Pencabutan Ijin Terbit (SIT) terjadi pada tanggal 22 Januari 1974 setelah terjadinya peristiwa Malapeta 15 Januari 1974 (Malari).

**Kata Kunci:** Pers, Kebijakan, *Indonesia Raya*

**Abstract**

*The freedom of speech wasn't fully realized in Indonesia during the New Order Era. The media is controlled by the government. The government had authority to revoke the publishing permit of press. As the cause of press policy in the beginning of New order, the pers used as a partner to subvert the power of communist party. Afterward, The government of the New Order used press as an instrument to maintain their power. The news, which threatened the state security, got a publication ban. The Indonesia Raya newspaper was a one of national newspapers that bravely opposed about misappropriation among the rulers.*

*This research was proposed to find out 1) How was the news that wrote by Indonesia Raya newspaper in 1973-1974?. 2) How was the policy of press in the New Order Era?. 3) Why did the Indonesia Raya Newspaper get publication License Revocation in 1974? The result showed that the development of press was influenced by government's control through the policy of press. Indonesia Raya newspaper in the New Order Era got a publication license revocation at 22<sup>nd</sup> January 1974 after The Malari incident at 15<sup>th</sup> January 1974.*

**Keywords:** The Press, The Policy, *Indonesia Raya*.

**PENDAHULUAN**

Koran *Indonesia Raya* merupakan surat kabar yang hadir di dua masa, yakni masa Orde Lama dan Orde Baru.<sup>1</sup> Periode pertama diterbitkannya surat kabar *Indonesia Raya* adalah tanggal 29 Desember 1949, yaitu dua hari setelah penandatanganan kedaulatan Reubublik Indonesia (RI) oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949.<sup>2</sup>

Masa Orde Baru, koran *Indonesia Raya* terbit kembali tanggal 30 Oktober 1968 yang secara resmi ditunjukkan dalam keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.0632/SK/DIR/PDLN/SIT/1968

yang menyatakan tentang pemberian ijin terhadap penerbitan surat kabar *Indonesia Raya*.<sup>3</sup> Pada tahun 1970-an, pers Indonesia mengalami serentetan peristiwa yang menjadi permulaan kesenjangan antara pemerintah Orde Baru dengan pers. Kasus korupsi yang menjamur dikalangan pejabat masa Orde Baru harus disaksikan oleh masyarakat. Masalah korupsi ini kemudian ramai diberitakan oleh pers. Koran *Indonesia Raya* yang di pimpin oleh Mochtar Lubis menjadi salah satu koran yang aktif dalam pemberitaan tersebut. Akibat dari berita-berita tersebut, menimbulkan kerusuhan yang dikenal dengan Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). Ribuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak

<sup>1</sup> Abdurrahman Surjomihardjo. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas. hlm. 169.

<sup>2</sup> Hill. David. T. 2011. *Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*. Edisi ke-1. Terjemahan: Warief Djajanto & Hanna Rambe. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 45.

<sup>3</sup> Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 0632/SK/DIR.PDLN/SSIT/1968 Tentang Pemberian Izin Terhadap Penerbitan Surat Kabar Indonesia Raya.

kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka untuk bernegosiasi dalam penanaman modal Jepang di Indonesia.

Pemberitaan surat kabar nasional atas kerusuhan Malari dianggap pemerintah sebagai tindakan yang menjurus pada pematangan situasi yang mengarah pada tindakan kerusuhan. Koran *Indonesia Raya*, juga dituduh sebagai profokator dalam kerusuhan Malari tahun 1974. Pada tanggal 22 Januari 1974 koran *Indonesia Raya* resmi dicabut ijin terbitnya setelah Menteri Penerangan mengeluarkan surat keputusannya dengan Nomor 20/SK/DIRJEN-PG/K/1974 yang menyatakan tentang pencabutan ijin terhadap penerbitan surat kabar *Indonesia Raya*.<sup>4</sup>

### KAJIAN PUSTAKA

Beberapa peneliti ini mengambil rujukan dari penelitian terdahulu. Penelitian tersebut adalah:

Satrio Saptohadi dengan judul "*Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*" adalah jurnal online berisi peraturan pers masa Orde Baru, era reformasi, dan kebebasan pers. Dijelaskan dalam jurnal tersebut, mengenai perkembangan teori pers yakni teori pers Otoriter, teori pers Liberal, teori pers tanggungjawab Sosial, dan teori pers Komunis. Penelitian dari Satrio Saptohadi memberikan kontribusi untuk kajian teoritis dalam penelitian ini.

David T. Hill dengan buku berjudul "*Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*" berisi mengenai kepemimpinan Mochtar Lubis sebagai pimpinan redaksi *Indonesia Raya* juga orang-orang yang berpengaruh dan menguasai penerbitan surat kabar, yang memainkan peranan penting dalam menentukan kehidupan politik, pendidikan, dan budaya nasional.

### METODE

Untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Terdapat empat tahapan di dalam metode Penelitian Sejarah yaitu :

#### 1. Heuristik

Heuristik yaitu mengumpulkan sumber dan data yang diperlukan. Pengumpulan data berupa sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber primer yang dicari berupa artikel dari koran *Indonesia Raya* tahun 1973-1974 yang diperoleh dari Monumen Pers Solo. Artikel yang didapat seperti: Koran *Indonesia Raya* (27 November 1973) yakni "Modal Jepang Harus Koreksi Diri". Sumber

sekunder antara lain: buku-buku yang berhubungan dengan pers masa Orde Baru yaitu buku "*Pers Di Masa Orde Baru*" dan "*Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*" karya dari David T.Hill, buku "*Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*" karya dari Mansyur Semma, buku "*Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*" karya dari Abdurrahman & Surjomihardjo yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surabaya.

#### 2. Kritik

Kritik (pengujian) terhadap sumber yang terdiri dari kritik ekstern (pengujian terhadap asli atau relevan tidaknya suatu sumber). Kritik intern yakni penelitian berfokus pada kebenaran isi dengan cara membandingkan sumber primer dan sekunder. Pada tahap ini peneliti melakukan kritik intern terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan melalui tahap heuristik. Kritik intern dilakukan dengan mengklasifikasi berbagai sumber tersebut baik yang berupa sumber primer maupun sumber sekunder untuk mendapati sumber yang kredibel sebagai fakta yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai pencabutan ijin terbit surat kabar *Indonesia Raya* masa Orde Baru.

Berdasarkan hasil kritik terhadap sumber primer, pembahasan mengenai pencabutan ijin terbit *Indonesia Raya* tahun 1974 didapat dari artikel-artikel yang dimuat oleh koran *Indonesia Raya* tahun 1973 hingga tahun 1974. Artikel tersebut memberikan gambaran informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa Orde Baru tahun 1974. Sedangkan hasil kritik sumber sekunder didapat dari buku "*Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*", karya Abdurrahman & Surjomihardjo membahas tentang sejarah pers Indonesia, serta pembreidelan pers yang dialami oleh surat kabar Indonesia terutama studi kasus tentang koran *Indonesia Raya*. Berbeda dengan buku karya Abdurrahman & Surjomihardjo, buku karya David yang berjudul "*Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*" membahas tentang kepemimpinan Mochtar Lubis sebagai pimpinan redaksi *Indonesia Raya* juga orang-orang yang berpengaruh dan menguasai penerbitan surat kabar, yang memainkan peranan penting dalam menentukan kehidupan politik, pendidikan, dan budaya nasional.

#### 3. Intepretasi

Intepretasi merupakan tahap ketiga dalam penelitian sejarah. Pada tahap interpretasi (penafsiran) peneliti melakukan interpretasi dengan mengaitkan fakta-fakta yang telah didapat dalam berbagai surat kabar sejaman pada masa Orde Baru, kebijakan-kebijakan

<sup>4</sup> Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 20/SK/DIRJEN-PG/K/1974 Tentang pencabutan ijin terhadap penerbitan surat kabar *Indonesia Raya*.

pemerintah, yang selanjutnya fakta-fakta tersebut diinterpretasikan dalam teori serta kajian dalam buku-buku yang berkaitan, untuk mendapati hasil yang di inginkan berkenaan dengan bagaimana sejarah surat kabar *Indonesia Raya* serta kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru terhadap pers.

#### 4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Dengan merangkai fakta yang telah ditafsirkan dan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah. Pada tahap ini peneliti menyusun berbagai fakta yang sudah diinterpretasikan dan menuliskan hasil penelitian dalam sebuah tulisan ilmiah sesuai dengan tema yakni: "Pencabutan Ijin Terbit Koran *Indonesia Raya* Tahun 1974".

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Berdirinya Koran *Indonesia Raya*

*Indonesia Raya* merupakan surat kabar nasional yang hadir di dua masa, yakni masa Orde Lama dan Orde Baru. Periode pertama diterbitkannya surat kabar *Indonesia Raya* adalah tanggal 29 Desember 1949, yaitu dua hari setelah penandatanganan kedaulatan Republik Indonesia (RI) oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949.<sup>5</sup> Nama *Indonesia Raya* berasal dari saran Teuku Sjahril ketika berkunjung ke kediaman Mochtar Lubis pada saat surat kabar ini hendak diterbitkan.

"Daripada susah-susah, ambil saja nama lagu kebangsaan kita," kata Sjahril.<sup>6</sup>

Ide pemberian nama koran *Indonesia Raya* muncul dari seorang Teuku Sjahril selaku pembantu tetap di penerbitan *Mutiara*, yang merupakan teman dari Mochtar Lubis. Ia menyarankan kepada Mochtar Lubis untuk menggunakan nama *Indonesia Raya* yang berasal dari lagu kebangsaan Indonesia untuk penerbitan Mochtar Lubis.

Pada tahun 1957-1958 penerbitan ini mengalami kesulitan *ekstern* dan *intern*. Kesulitan *ekstern* yang dialami oleh surat kabar *Indonesia Raya* adalah pembreidelan yang berdampak pada kesulitan finansial yang terjadi sebanyak enam kali.<sup>7</sup> Sedangkan kesulitan *intern* yang terjadi pada periode pertama adalah pertikaian antara Hasjim Mahdan dan Mochtar Lubis yang dipicu karena adanya perbedaan pandangan keduanya menyangkut sikap koran *Indonesia Raya* terhadap pemerintah.

Pada Bulan Agustus tahun 1958 konflik memuncak ketika Menteri Penerangan menawarkan bantuan keuangan dari pemerintah kepada Hasjim Mahdan untuk mengajak Mochtar Lubis agar *Indonesia Raya* tidak berposisi terhadap pemerintah dan dengan keras Mochtar Lubis menolak hal tersebut. Penolakan tersebut menimbulkan gagasan surat kabar baru dengan nama *Suara Indonesia Raya*.

Permintaan ijin terbit *Suara Indonesia Raya* yang diajukan oleh Mochtar Lubis ditolak oleh Penguasa Perang Daerah (Peperda) Jakarta Raya tertanggal 10 September 1958. Sedangkan, *Indonesia Raya* versi Hasjim Mahdan mendapatkan ijin terbitnya tertanggal 16 Oktober 1958 yang hanya bertahan selama kurang dari tiga bulan.<sup>8</sup> Bertahannya koran *Indonesia Raya* versi Hasjim Mahdan tidak lebih dari tiga bulan tersebut, dikarenakan *Indonesia Raya* versi baru berbeda dengan versi lama yang berani bersikap kritis terhadap pemerintahan Orde Lama. Gaya baru dalam berita-berita yang disajikan oleh *Indonesia Raya* menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat. Hal tersebut membuat *Indonesia Raya* kehilangan pelanggannya dan bertahan hanya sampai 2 Januari 1959, ketika koran tersebut secara sukarela berhenti terbit.<sup>9</sup>

Berakhirnya koran *Indonesia Raya* periode pertama di latarbelakangi karena adanya masalah *internal*. Konflik antara Mochtar Lubis dan Hasjim Mahdan karena adanya perbedaan pandangan memunculkan *Indonesia Raya* terbit dalam dua versi. Versi Mochtar Lubis *Indonesia Raya* menjadi *Suara Indonesia Raya*, sedangkan versi Hasjim Mahdan *Indonesia Raya* tetap tidak berubah nama. Namun, permintaan ijin terbit *Suara Indonesia Raya* ditolak oleh pemerintah, sedangkan *Indonesia Raya* versi Hasjim Mahdan hanya bertahan kurang dari tiga bulan pasca Mochtar menolak gagasan untuk kompromi dengan pemerintah Orde Lama. Perpecahan tersebut menjadi penutupan *Indonesia Raya* pada periode pertama masa Orde Lama.

Setelah hampir lebih dari sepuluh tahun *Indonesia Raya* berhenti dari persuratkabaran, kemudian ada keinginan untuk menerbitkan kembali surat kabar *Indonesia Raya* oleh Mochtar Lubis.<sup>10</sup> Penerbitan *Indonesia Raya* masa Orde Baru dimulai kembali pada tanggal 30 Oktober 1968 yang secara resmi ditunjukkan dalam Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 0632/SK/DIR/PDLN/SIT/1968 yang menyatakan tentang pemberian ijin terhadap penerbitan

<sup>5</sup> Hill. David. T. 2011. *Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*. Edisi ke-1. Terjemahan: Warief Djajanto & Hanna Rambe. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 45.

<sup>6</sup> Ignatius Haryanto. 2006. Hlm. 55.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>8</sup> Atmakusumah. 1992. *Mochtar Lubis, Wartawan Jihad*. Jakarta: Gramedia. hlm. 82.

<sup>9</sup> Hill. David. T. 2011. *Jurnalisme dan Politik di Indonesia*. hlm. 77.

<sup>10</sup> Abdurrahman Surjomihardjo. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas. hlm. 269.

surat kabar *Indonesia Raya*.<sup>11</sup> Penerbitan *Indonesia Raya* masa Orde Baru berlangsung selama lima tahun dalam kisaran tahun 1968-1974 yang mengalami satu kali pembreidelan yang bersifat fatal. Memasuki periode kedua (1968) surat kabar *Indonesia Raya* dicetak di perusahaan Sastra Kentjana, di Jalan Medan Merdeka Utara 11, sebelum membangun gedung dan percetakannya sendiri di Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, yang mulai beroperasi pada awal Desember 1970. Untuk meneruskan penerbitan periode kedua, Mochtar Lubis mengajak kembali sejumlah staf yang membantunya pada periode sebelum surat kabar ini dibreidel, yaitu: Kustiniyati Mochtar, D. H Assegaf, Enggak Bahau'din, Mohamadnoer, K. Sidharta, dan Sam Soeharto.<sup>12</sup>

Menjelang penutupannya masa Orde Baru, koran *Indonesia Raya* memberitakan isu-isu korupsi dan hubungan kerja sama antara Indonesia-Jepang. Kritik tajam lewat tajuk-tajuk rencana *Indonesia Raya* atas kerja sama yang dijalin berdampak negatif pada rakyat. Meningkatnya aksi protes mahasiswa menolak kerja sama dengan Jepang dan banyaknya korupsi dalam pemerintah menimbulkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Orde Baru

Pada 15 Januari 1974 bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang (*Kakuei Tanaka*) ke Indonesia. Demonstrasi para mahasiswa tumpah di Ibu kota Jakarta. Para Mahasiswa menyerang dan merusak mobil-mobil, gedung-gedung, pabrik minuman dll, yang ada hubungannya dengan Jepang.<sup>13</sup> Aksi para mahasiswa tersebut menuntut adanya perubahan yang lebih baik kearah yang diinginkan. Kerusakan yang terjadi di Ibu kota tersebut dikenal sebagai peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974).

Peristiwa Malari mengakibatkan pemerintah melakukan pembreidelan secara massal terhadap 12 surat kabar, diantaranya: *Nusantara*, *Harian KAMI*, *Abadi*, *The Jayakarta Times*, *Mingguan Senang*, *Pemuda Indonesia*, *Majalah Berita Minggu Ekspres*, *Pedoman*, *Suluh Berita*, *Mahasiswa Indonesia*, dan *Indonesia Raya* tertanggal 22 Januari 1974.<sup>14</sup> Pemerintah memperlakukan pers sebagai bagian dari sebuah konspirasi politik “anti negara” yang bertujuan untuk menumbangkan rezim Orde Baru. Selain itu, menyusul pemberitaan berkenaan dengan peristiwa Malari, Laksus Pangkoptambda Jakarta Raya dan sekitarnya mengemukakan alasan

pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) *Indonesia Raya*, antara lain:

“Harian *Indonesia Raya* telah memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan kepemimpinan nasional.

Harian *Indonesia Raya* dengan tulisan-tulisannya dianggap menghasut rakyat sehingga membuka peluang yang dapat memperparah situasi sekaligus mengadu domba antara pimpinan nasional dengan yang lain”.<sup>15a</sup>

Pencabutan ijin terbit oleh pemerintah terhadap koran *Indonesia Raya* masa Orde Baru, karena koran tersebut dianggap telah memuat berita yang bernada mengprofokasi masyarakat. Sehingga pemerintah takut akan adanya sikap ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan atas dasar alasan tersebut pemerintah mencabut ijin terbit *Indonesia Raya*.

Pada tanggal 21 Januari 1974 Laksus Pangkoptambda Jakarta mencabut Surat Ijin Cetak (SIC) karena telah memuat tulisan-tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan kepemimpinan nasional dan dianggap menghasut rakyat. Sehingga membuka peluang yang dapat memantapkan situasi ke arah terjadinya kekacauan-kekacauan pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974, serta dapat memecah belah pimpinan satu dengan yang lain. Pada tanggal 22 Januari 1974, Departemen Penerangan mencabut Surat Ijin Terbit (SIT) koran *Indonesia Raya* dengan alasan lain yang menunjuk pada berita-berita yang dimuat berisi tentang isu-isu seperti modal asing, korupsi, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat pada kepentingan nasional.

#### A. Biografi Mochtar Lubis

Mochtar Lubis adalah seorang tokoh jurnalistik Indonesia yang lahir pada tanggal 7 Maret 1922, di Padang, Sumatera Barat. Terlahir dari pasangan Raja Pandapotan Lubis dan Siti Madinah Nasution yang merupakan bangsawan Mandailing. Sikap kritis dan disiplin yang dimiliki oleh Mochtar Lubis diwarisi dari ayahnya. Mochtar Lubis diajarkan oleh ayahnya sikap kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. Raja Pandapotan Lubis mencoba mengajarkan banyak hal, seperti: *skill*, merancang jembatan, pasar, sistem irigasi, jalan, dan memantau pembangunan daerah. Ia mendidik anaknya dengan menjelaskan pentingnya keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia, serta mengajarkan etos kerja keras. Namun, ia tidak ingin anak-anaknya bekerja

<sup>11</sup> Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.0632/SK/DIR.PDLN/SSIT/1968 Tentang Pemberian Izin Terhadap Penerbitan Surat Kabar Indonesia Raya.

<sup>12</sup> Abdurrahman. *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>13</sup> Yogaswara. 2009. *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)*. Yogyakarta: LkiS. hlm. 12.

<sup>14</sup> Hill. David.T. 2011. *Pers Di Masa Orde Baru*: Edisi I. Jakarta: Indonesia. hlm. 38.

<sup>15</sup> Abar, Akhmad Zaini. *op.cit.*, hlm. 74.

pada pemerintah kolonial dan meminta anak-anaknya hidup secara mandiri dari pemerintah.<sup>16</sup>

Riwayat pendidikan Mochtar Lubis dimulai di sekolah HIS Sungai Penuh yang ditempuh selama empat tahun (lulus tahun 1936). Kemudian melanjutkan di sekolah Ekonomi INS di Kayutanam (lulus tahun 1940) dan melanjutkan kembali di Universitas Hawaii, Amerika Serikat.

Masa hidupnya, Mochtar Lubis memulai karirnya dengan bekerja pada Bank Factory di Jakarta. Perjalanan karirnya di dalam dunia pers berawal sekitar tahun 1945 dengan menjadi wartawan LKBN. Selain itu, ia juga aktif dalam beberapa media massa seperti: menjadi Pimpinan Redaksi Majalah Mutiara, Pimpinan Umum Majalah Sastra Horison, dan Pimpinan Redaksi Harian Indonesia Raya.

Ketika Mochtar Lubis menjadi pemimpin umum dan pemimpin redaksi surat koran *Indonesia Raya*, ia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan *Indonesia Raya*. Khalayak memandang bahwa koran *Indonesia Raya* merupakan cerminan dari pikiran, pandangan, dan idealis pemimpin redaksinya. Koran *Indonesia Raya* seringkali disebut sebagai koran Mochtar Lubis sehingga seolah-olah surat kabar tersebut menjadi personifikasi pandangan Mochtar Lubis.

Mochtar Lubis pernah menyatakan bahwa penghormatan terhadap kebebasan pers dan kebudayaan haruslah dipelihara dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Prinsip yang selalu dipegang seorang Mochtar Lubis adalah “berani karena benar” tidak takut untuk menyiarkan suatu berita jika memang mengandung kebenaran, tidak mengganggu keselamatan negara, dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>17</sup> Seyogyanya sebuah koran tidak dapat lagi mencetak berita sesuai dengan haluannya, maka koran tersebut mempunyai tanggung jawab moral untuk berhenti. Dan kepentingan staf menjadi hal kedua setelah misi koran.<sup>18</sup> Hal tersebut merupakan sikap yang tegas dan keras seorang Mochtar Lubis dalam menjalankan *Indonesia Raya*. Sikap idealisme dalam diri seorang Mochtar Lubis tidak terlepas dari didikan sang Ayah yang sangat disiplin.

*Indonesia Raya* oleh beberapa pengamat masalah pers dikategorikan ke dalam *the muckraking paper*, yaitu surat kabar yang sering memberitakan skandal politik dan ekonomi. Para pembaca menyebutnya sebagai *the crusading paper* atau surat kabar jihad.

Berjihad menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan foedalisme dalam sikap manusia. Dengan adanya hal tersebut, Mochtar Lubis dikenal dengan sebutan wartawan jihad. Menurut Arief Budiman, Mochtar Lubis adalah manusia multidimensional yang mempunyai banyak bakat.<sup>19</sup>

Serentetan perjalanan panjang karir Mochtar Lubis dalam dunia pers berakhir, ketika ia menutup mata pada 2 Juli 2004 di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.<sup>20</sup>

## B. Kebijakan Pers Masa Orde Baru (Tahun 1968-1974)

Surat Ijin terbit (SIT) adalah serangkaian kebijakan yang telah diterapkan dari masa pemerintah Orde Lama untuk mengatur ijin terbit bagi pers. Perijinan pers ditegaskan pada Penpers No. 6 tahun 1963 (pasal 6) yang menyatakan, bahwa perlunya ijin terbit bagi harian dan majalah. Percetakan tidak boleh mencetak harian dan majalahnya, bila tidak mempunyai ijin terbit.

Dilihat dari fungsinya Surat Ijin Terbit (SIT) digunakan pemerintah Orde Lama untuk mencekal tulisan-tulisan dan gambar-gambar di majalah-majalah yang dianggap melanggar TAP-MPRS No. 32/1966 Pasal 33 (h) PERMENPEN No. 1/1984 yang berisi tentang moral dan tata susila serta kepribadian bangsa, serta untuk mencekal kebebasan komunikasi politik yang dijalankan oleh pers yang berhubungan erat dengan soal tulisan atau gambar yang menghina dan tidak bersusila, supaya pers dapat membatasi opini beritanya sesuai dengan ideologi Pancasila.<sup>21</sup> Pemerintah Orde Lama melakukan kontrol ketat terhadap kehidupan pers. Kebijakan mengeluarkan Surat Ijin Terbit (SIT) bagi setiap penerbitan menjadi suatu batasan dalam mengutarakan pendapatnya. Selain, pemberlakuan SIT ada pula kebijakan pemerintah mengenai Surat Ijin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtibda.

Masa Orde Baru ditandai dengan keputusan Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto melalui Tap MPRS No. IX tahun 1967, yang menyatakan tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Pada tahun 1968 masa pemerintah Orde Baru, memandang dan memperlakukan pers sebagai *partner* untuk menumbangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan rezim Demokrasi Terpimpin secara keseluruhan.<sup>22</sup> Selain itu juga pers digunakan oleh pemerintah sebagai sarana propaganda untuk menggerakkan pembangunan nasional.

<sup>16</sup> Mansyur Semna. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm 140.

<sup>17</sup> Atmakusumah. 1992. *Mochtar Lubis, Wartawan Jihad*. Jakarta: Gramedia. hlm. 240.

<sup>18</sup> Hill. David. T. 2011. *Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*. Edisi ke-1. Terjemahan: Warief Djajanto & Hanna Rambe. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 76.

<sup>19</sup> Atmakusumah. 1992. *Mochtar Lubis*. Jakarta: PT Gramedia. hlm. 23.

<sup>20</sup> Hill. David. T. 2011. *Ibid*. hlm. 212.

<sup>21</sup> Ignatius Haryanto. 2006. *Indonesia Raya Dibredele*. Jakarta: LSPP. hlm. 45-47.

<sup>22</sup> Ahmad Zaini Abar. 1995. *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*. Jogjakarta: LkiS. hlm. 75.

Pada tanggal 27 Mei tahun 1969, Menteri Penerangan Republik Indonesia (RI) Boediardjo mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan RI (Permenpen) No.03/PER/MENPEN/1969 tentang Lembaga Surat Ijin Terbit dalam Masa Peralihan bagi penerbitan pers yang bersifat umum. Peraturan tersebut mengatur tentang prosedur pimpinan penerbitan pers untuk mengajukan permohonannya mendapatkan Surat Ijin Terbit (SIT).<sup>23</sup>

Dalam Permerpen No. 03/PER/MENPEN/1969 dijelaskan bahwa Surat Ijin Terbit juga memiliki ketentuan-ketentuan bahwa setiap perubahan dari ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam Surat Ijin Terbit (SIT) harus dapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Penerangan untuk perubahan atau pembaruan SIT-nya dengan mengingat pasal 12.<sup>24</sup>

Selain, pemberlakuan SIT ada pula kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai Surat Ijin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtibda. Surat Ijin Cetak (SIC) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan akibat peristiwa G30S/PKI tahun 1965 yang dikelola oleh Departemen Penerangan. Penerapan SIC oleh pemerintah dimaksudkan agar pers tidak dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada saat itu menaruh perhatian khusus kepada pers, karena pers bagi pemerintah adalah instrumen pelaksana proses hegemoni ideologi. Surat Ijin Cetak (SIC) harus dimiliki setiap penerbit surat kabar, apabila Kopkamtib mencabut SIC maka penerbitan tersebut tidak dapat mencetak beritanya.

Pada masa Orde Baru ini penguasa lebih bersikap menahan diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih keras terhadap pers. Bahkan pemerintah masih memberikan suasana yang kondusif bagi kebebasan pers. Sikap menahan diri tersebut didukung beberapa kemungkinan, diantaranya karena pemerintah Orde Baru masih membutuhkan legitimasi dan politis dari masyarakat sebagai penguasa yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD'45. Selain itu, pemerintah merasa konsolidasi masih dalam proses penyelesaian yang cukup rumit, sehingga belum siap berhadapan dengan kekuatan masyarakat yang sedang mengalami "demam demokratisasi". Pemerintah juga menganggap bahwa kritik-kritik pers yang masih bisa ditolerir dianggap bermanfaat untuk memperbaiki diri.<sup>25</sup> Ketika proses konsolidasi selesai, sikap dan perilaku

penguasa terhadap pers berubah secara radikal.<sup>26</sup> Pers yang melakukan kritik keras terhadap pemerintah Orde Baru akan langsung mendapat peringatan atau ancaman pencabutan ijin terbit.

### C. Kronologi Pencabutan Ijin Koran Indonesia Raya Tahun 1974

#### 1. Proses Pencabutan Ijin Terbit Koran Indonesia Raya Tahun 1974

Koran *Indonesia Raya* secara resmi dicabut ijin terbitnya setelah kerusuhan Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) di Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Januari 1974 oleh Departemen Penerangan. Kerusuhan Malari terjadi pada tanggal 14-17 Januari 1974, ketika Perdana Menteri Jepang Tanaka berkunjung di Jakarta untuk melakukan negosiasi dengan Indonesia terkait masalah penanaman Modal Jepang ke Indonesia. Namun, karena adanya penolakan dari Masyarakat menyebabkan Perdana Menteri Tanaka hanya dapat bergerak di dalam Istana dan lapangan udara Halim Perdanakusuma akibat demonstrasi besar-besaran di Ibu Kota.

Pada tanggal 17 Januari 1974 Presiden Soeharto mengeluarkan suatu pernyataan dalam menindak lanjuti kerusuhan Malari, berikut pernyataan Presiden:

"Demonstrasi yang menurut pengalaman menimbulkan kekacauan dalam masyarakat tidak dibenarkan. Menerbitkan pemberitaan dalam pers ataupun surat-surat kabar. Menerbitkan kehidupan dalam universitas-universitas dan sekolah-sekolah agar tidak digunakan untuk kepentingan politik".<sup>27</sup>

Dalam pernyataan tersebut Presiden menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di masyarakat tidak dibenarkan. Bagi penerbitan pers, kehidupan universitas /mahasiswa, sekolah/pelajar diharapkan untuk tetap tenang dan tetap bersatu, agar situasi yang demikian tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Pada tanggal 21 Januari 1974 Laksus Pangkobkamtibda Jakarta mencabut Surat Ijin Cetak dari harian-harian *Kami*, *Abadi*, *The Jakarta Times*, *Mingguan Wenang*, *Pemuda Indonesia*, dan *Indonesia Raya*. Surat kabar tersebut, dicabut SIC-nya karena telah memuat tulisan-tulisan yang dapat merusak kewibawahan dan kepercayaan kepemimpinan nasional dan dianggap menghasut rakyat, sehingga membuka peluang yang dapat

<sup>23</sup> "Lampiran:Peraturan Menteri Penerangan RI No. 03/PER/MENPEN/1969 tentang Lembaga Surat Ijin Terbit dalam Masa Peralihan bagi Penerbitan Pers yang bersifat umum, pasal 2 ayat (1)", dalam Abdurrahman. 2002. hlm. 386.

<sup>24</sup> Pasal 12 berbunyi Surat Kabar Harian yang selama 6 (enam) bulan terus-menerus tidak terbit SIT dan segala fasilitas yang diperolehnya dengan sendirinya batal.

<sup>25</sup> Ahmad Zaini Abar.1995. *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*. Yogyakarta: LkiS. Hlm. 70.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 75

<sup>27</sup> Abdurrahman Surjomihardjo. 2004. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas. hlm. 289.

mematangkan situasi ke arah terjadinya kekacauan-kekacauan pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974, serta dapat memecah belah pimpinan satu dengan yang lain.<sup>28</sup> Pada tanggal 22 Januari 1974, Departemen Penerangan mencabut ijin terbit koran *Indonesia Raya* dengan alasan lain yang menunjuk pada berita-berita yang dimuat berisi tentang isu-isu seperti modal asing, korupsi, dan merusak kepercayaan masyarakat pada kepentingan nasional.

#### D. Berita-Berita Koran Indonesia Raya Yang Menjadi Penyebab Dicabutnya Ijin Terbit Tahun 1974

Beberapa liputan yang menjadi alasan dicabutnya ijin terbit koran *Indonesia Raya*, di antaranya: Kasus tentang asisten-asisten pribadi Presiden, kasus korupsi di Pertamina, penanaman modal asing (Jepang), dan kerusuhan Malapeta 15 Januari 1974 (Malari).

##### 1. Berita Pertama (Masalah Pertamina)

“Tindakan pimpinan Pertamina (Ibnu Sutowo) menutup kontrak kredit di luar negeri untuk beberapa pembelian yang berjumlah ratusan juta dolar menimbulkan reaksi di kalangan negara-negara kreditor Indonesia, nyata merupakan puncak dari sikap pimpinan Pertamina yang mau jalan sendiri tanpa mengindahkan politik Pemerintah Indonesia sendiri. Pengeluaran keuangan dalam jumlah besar digunakan untuk dana yang berada di luar bidang pekerjaan Pertamina (belum dihitung hadiah-hadiah perangkat untuk main golf yang harganya mahal), yang dihadiahkan pada banyak orang yang disenanginya atau yang diperlukannya”.<sup>29</sup>

Tajuk rencana tersebut memperlihatkan bahwa koran *Indonesia Raya* mengkritik sikap Ibnu Sutowo yang mempunyai kuasa tinggi dalam menjalankan keuangan Pertamina. Ibnu Sutowo menggunakan dana perusahaan untuk keperluan diluar urusan Perusahaan, seperti: pembelian perlengkapan golf sebagai hadiah mewah yang diberikan kepada rekan bisnis atau orang-orang yang berjasa dalam kelancaran bisnisnya.

##### 2. Berita Kedua (Modal Jepang Harus Koreksi Diri)

“Kita amat memuji kegiatan-kegiatan mahasiswa dan harus merasa bangga melihat masih cukup banyak orang Indonesia yang belum terbeli oleh kekuatan ekonomi Jepang. Yang kita harapkan adalah kesadaran lebih berdasarkan mengenai kepentingan bangsa kita pada penguasa yang mengurus ekonomi bangsa kita ini”.<sup>30</sup>

Dalam tajuk rencana *Indonesia Raya* mengenai Modal Jepang yang masuk ke Indonesia dianggap merugikan rakyat. Persebaran ekonomi Jepang di Indonesia dapat menjadi sebuah ancaman dalam perekonomian negara yang berimbas pada rakyat. Untuk itu *Indonesia Raya* mengkritik dengan tegas pemerintah menyangkut penanaman modal Jepang di Indonesia.

##### 3. Berita Ketiga (Apa Tujuan Penanaman Modal Jepang di Asia?)

“Tujuan pokok penanaman modal Jepang di berbagai negara di Asia dan Australia mula-mula adalah untuk menjamin sumber bahan-bahan mentah bagi industrinya dan menjamin pemasaran bagi hasil produksi pabrik-pabriknya.

Ditinjau dari kepentingan modal Jepang, tentu perkembangan serupa ini menguntungkan. Tetapi apakah akan menguntungkan bagi negara-negara Asia. Karena, industri sepotong-sepotong seperti ini tidak memungkinkan suatu negara untuk mengembangkan produksi TV yang lengkap, mobil yang jadi, dll. Setiap negara hanya akan menghasilkan kepingan saja dari suatu barang. Perkembangan serupa ini dapat disebut **kolonialisme teknologis** yang memaksakan kedudukan teknologis rendah pada negara berkembang.<sup>31</sup>

Tajuk rencana tersebut menjelaskan tentang tujuan penanaman modal Jepang di Asia termasuk Indonesia. Penanaman modal Jepang dianggap sebagai bentuk kolonialisme teknologis, yang memaksakan

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 291.

<sup>29</sup> “Tajuk Rencana: Masalah Pertamina, *Indonesia Raya* (25 November 1969)”. Dikutip dari: Taufik Abdullah. 1977. Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di *Harian Indonesia Raya Seri 2: Politik Dalam Negeri dan Masalah Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 24.

<sup>30</sup> “Modal Jepang Harus Koreksi Diri”, Tajuk Rencana *Indonesia Raya*, 27 November 1973.

<sup>31</sup> “Tajuk Rencana: Apa Tujuan Penanaman Modal Jepang di Asia, *Indonesia Raya* (1 Desember 1973)”. Dikutip dari Taufik Abdullah. 1977. hlm. 308.

kedudukan teknologis rendah pada negara-negara berkembang.

#### 4. Berita Keempat Hubungan Pemerintah dan Pers (Presiden Soeharto: Kebebasan Pers Bukan Untuk Tujuan-Tujuan Yang Salah)

“Presiden Soeharto memberikan peringatan kepada pers agar kebebasan pers tidak digunakan untuk tujuan yang salah. Pembinaan alat komunikasi massa perlu dilakukan, sebab tanpa adanya pembinaan alat komunikasi, massa akan dapat menyesatkan masyarakat dengan berita yang tidak berdasarkan kenyataan atau berita yang semata-mata bertujuan komersial.”<sup>32</sup>

Dalam pemberitaan tersebut, *Indonesia Raya* menyuarakan bahwa Presiden telah memberikan peringatan pada setiap penerbitan untuk tidak memberitakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga Presiden berupaya melakukan pembinaan alat komunikasi massa untuk mengarahkan pers kepada pemberitaan-pemberitaan berdasarkan fakta.

#### 5. Berita Kelima (Penolakan kedatangan Perdana Menteri Jepang)

“Setelah kami melakukan kewajiban tata krama Indonesia menyambut tamu yang baik, maka tiba pula waktunya untuk berbicara berpahit-pahit dengan tamu dari utara ini, Perdana Menteri Tanaka.

Kami ingin menegaskan kepada Tanaka bahwa dalam sejarah hubungan Jepang dengan Indonesia, Indonesia hanya mengalami kepahitan yang luar biasa saja. Pengalaman rakyat Indonesia di bawah telapak kaki besi tentara Nippon tidak kalah buruknya dan sakitnya seperti pengalaman rakyat Eropa di bawah telapak kaki kaum Nazi Jerman”.<sup>33</sup>

Koran *Indonesia Raya* mengkritik dengan tegas kedatangan perdana Menteri Jepang (Tanaka) dengan membuka ingatan pembaca

mengenai sejarah kelim hubungan Jepang dengan Indonesia. Hubungan yang terjalin sangat merugikan Indonesia. Pengalaman rakyat Indonesia di bawah telapak kaki besi tentara Nippon tidak jauh berbeda seperti nasib rakyat Eropa di bawah telapak kaki kaum Nazi Jerman.

Dari beberapa pemberitaan koran *Indonesia Raya* diatas, terdapat berbagai macam kritik yang dilontarkan *Indonesia Raya* pada pemerintah. Kritik yang paling tajam terlihat pada tajuk rencana yang menolak kedatangan perdana Menteri Jepang Tanaka. Berita-berita tersebut, dianggap oleh pemerintah dapat merusak kewibawahan dan kepercayaan kepemimpinan nasional dan dianggap menghasut rakyat, sehingga membuka peluang yang dapat mematangkan situasi ke arah terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).

#### E. Upaya Indonesia Raya Menghadapi Pencabutan Ijin Terbit Masa Orde Baru

Pencabutan ijin terbit koran *Indonesia Raya* masa Orde Baru terjadi pada 22 Januari 1974. Mendapati koran *Indonesia Raya* yang dicabut ijin terbitnya, Mochtar Lubis melakukan pembelaan dengan menekan Menteri Penerangan dan panglima baru Kopkamtib untuk membenarkan pelarangan *Indonesia Raya* di pengadilan. Namun, mereka menyarankan kepada Mochtar Lubis untuk menahan diri dan menunggu tindak lanjut dari Presiden Soeharto.

Para staf dari penerbitan pers yang dicabut ijin terbitnya masa Orde Baru dimasukkan dalam “daftar hitam” pemerintah. Para wartawan tersebut, tidak diperbolehkan mengelola media pers lagi dalam waktu yang tidak jelas batasnya. Pemerintah mengharuskan calon pemberi kerja harus memperoleh “clearance” (pengabulan atau ijin) khusus dari Departemen Penerangan sebelum memperkerjakan wartawan yang namanya tercantum dalam daftar hitam dari koran-koran yang dilarang terbit.<sup>34</sup>

Pada periode kedua masa terbit koran *Indonesia Raya*, diwarnai dengan penangkapan dan

<sup>32</sup> “Presiden Suharto: Kebebasan Pers Bukan Untuk Tujuan-Tujuan Yang Salah”, *Indonesia Raya*, 5 Januari 1973.

<sup>33</sup> Taufik Abdullah. 1977. Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di *Harian Indonesia Raya Seri 1: Politik Dalam Negeri dan Masalah Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 419.

<sup>34</sup> Hill. David. T 2011. *Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*. Edisi ke-1. Terjemahan: Warief Djajanto & Hanna Rambe. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 148.



pembebasan. Wakil pimpinan redaksi Enggak Bahau'ddin ditahan tanggal 21 Juni 1974 di Rumah tahanan Militer di Jalan Budi Utomo dan dibebaskan pada tanggal 7 Mei 1974. Pada tanggal 4 Januari 1975, Pimpinan redaksi Mochtar Lubis ditahan ditempat tahanan Nirbaya sampai 15 April 1975. Penundaan penangkapan Mochtar Lubis, digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan barang bukti, yaitu dokumen yang menerangkan bahwa Mochtar Lubis dan Enggak Bahau'ddin mengadakan rapat rahasia untuk menggulingkan pemerintah.

Setelah terjadinya penangkapan dan pelepasan, Mochtar Lubis didekati oleh orang-orang yang bekerja di Departemen Penerangan. Mereka memberikan tawaran kepada Mochtar Lubis bahwa Mochtar Lubis diperbolehkan menerbitkan koran lain tanpa nama *Indonesia Raya* atau menerbitkan *Indonesia Raya* tanpa namanya. Tawaran tersebut, ditolak oleh Mochtar Lubis, dengan berargumen bahwa baik dia maupun *Indonesia Raya* tidak pernah melawan hukum dan untuk berkompromi berarti mengakui kesalahan yang dituduhkan. Dengan kata lain, pencabutan ijin terbit koran *Indonesia Raya* periode kedua terjadi akibat tulisan-tulisan yang dimuat yang bernada merusak kewibawahan dan kepercayaan rakyat yang menunjuk pada Malapetaka 15 Januari 1974.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Perkembangan pers di Indonesia sering mengalami perubahan seiring dengan bergantinya pemerintahan. Pers menjadi salah satu media yang terkena dampak dari pergantian kekuasaan tersebut. Kondisi politik Indonesia yang mempengaruhi pers menjadi bukti nyata bahwa pers di Indonesia menganut pers otoriter karena pers dikendalikan oleh pemerintah. Pengendalian pemerintah berwujud pada Surat Ijin Terbit (SIT) yang harus dimiliki oleh setiap penerbitan pers. Koran *Indonesia Raya* berkembang di dua masa, yakni pada 29 Desember 1949 hingga 2 Januari 1959 untuk periode pertama dan 30 Oktober 1968 hingga 21 Januari 1974 untuk periode kedua. Berita-berita dan kritik-kritik yang ditulis bersifat keras dan berani terhadap pemerintah, yang membuat koran *Indonesia Raya* berkali-kali kehilangan ijin terbitnya.

Pada tanggal 21 Januari 1974 Laksus Pangkobkamtibda Jakarta mencabut Surat Ijin Cetak (SIC) tulisan yang dapat merusak kewibawahan dan kepercayaan kepemimpinan nasional dan dianggap menghasut rakyat, sehingga membuka peluang yang dapat mematangkan situasi ke arah terjadinya kekacauan-kekacauan pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974, serta

dapat memecah belah pimpinan satu dengan yang lain. Pada tanggal 22 Januari 1974, Departemen Penerangan mencabut Surat Ijin Terbit (SIT) koran *Indonesia Raya*.

Mendapati koran *Indonesia Raya* yang dicabut ijin terbitnya, Mochtar Lubis melakukan pembelaan dengan menekan Menteri Penerangan dan panglima baru Kopkamtib untuk membenarkan pelarangan *Indonesia Raya* di pengadilan. Namun, Menteri Penerangan dan Panglima Kopkamtib menyarankan kepada Mochtar Lubis untuk menahan diri dan menunggu tindak lanjut dari Presiden Soeharto. Para staf dari penerbitan pers yang dicabut ijin terbitnya masa Orde Baru dimasukkan dalam "daftar hitam" pemerintah.

Serentetan perjalanan panjang *Indonesia Raya* dalam dunia persuratkabaran nasional harus berhenti ketika Presiden memerintahkan Panglima Kopkamtib mencabut Surat Ijin Terbit koran *Indonesia Raya* tanggal 22 Januari 1994. Dampak dari pencabutan Ijin terbit tersebut, *Indonesia Raya* mengalami kerugian yang besar dan dililit hutang. Sehingga, kantor *Indonesia Raya* harus disewakan untuk menutupi kerugiannya. Hasil dari menyewakan kantor *Indonesia Raya* belum bisa menutupi semua hutang *Indonesia Raya* sampai tahun 1980-an. Baru pada akhir tahun 1990 hutang-hutang *Indonesia Raya* lunas dibayarkan setelah Perusahaan Penerbitan *Indonesia Raya* dijual. Demikian, perjalanan panjang koran *Indonesia Raya* yang harus berakhir tanggal 22 Januari setelah Laksus Pangkobkamtibda Jakarta mengeluarkan surat putusan mencabut Surat Ijin Cetak (SIC) dan Surat Ijin Terbit (SIT) koran *Indonesia Raya*.

### B. Saran

1. Sebagai bagian dari suatu negara, pers berkedudukan sebagai kontrol sosial di dalam suatu pemerintahan yang seharusnya tidak mendapat kekangan dari pemerintah yang berkuasa.
2. Pemerintah tidak seharusnya membatasi pers secara otoriter, karena pada dasarnya dapat mengurangi kinerja dan fungsi dari pers.
3. Sebaliknya pers juga harus bersikap objektif dalam setiap pemberitaannya. Penelitian "Pencabutan Ijin Terbit Koran Indonesia Raya Tahun 1974" dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempelajari sejarah yang berkaitan dengan sejarah pers di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Dokumen-Dokumen Resmi

Peraturan Menteri Penerangan RI No. 03/PER/MENPEN/1969 tentang Lembaga Surat

Ijin Terbit dalam Masa Peralihan bagi Penerbitan Pers yang bersifat umum.

- Surat Keputusan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya No: KEP 063 PK/IC/VIII/1993 Tentang Pemberian Izin Cetak Majalah/Surat Kabar/Mingguan/Bulletin/dll.
- Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 20/SK/DIRJEN-PG/K/1974 Tentang Pencabutan Surat Izin Terbit (SIT) Surat Kabar Harian Indonesia Raya.
- Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.0632/SK/DIR.PDLN/SSIT/1968 Tentang Pemberian Izin Terhadap Penerbitan Surat Kabar Indonesia Raya.
- Surat Keputusan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban No: KEP-007/K/I/74 Tentang Pencabutan Izin Cetak Surat Kabar Harian Indonesia Raya.

#### **B. Sumber Koran :**

- Indonesia Raya*, 1 Desember 1973. "Tajuk Rencana: Apa Tujuan Penanaman Modal Jepang di Asia".
- Indonesia Raya*, 17 Juli 1973, "Ekspor Minyak Triwulan I Hampir 93,5 Juta Barrel".
- Indonesia Raya*, 27 November 1973. "Tajuk Rencana: Modal Jepang Harus Koreksi Diri".
- Indonesia Raya*, 5 Januari 1973, "Jend. Sumitro: Nasib "SH" Ditentukan Hasil2 Pemeriksaan (Tiga Koran Lagi Dapat Peringatan)".
- Indonesia Raya*, 5 Januari 1973, "Presiden Suharto: Kebebasan Pers Bukan Untuk Tujuan-Tujuan Yang Salah".
- Indonesia Raya*, 7 Mei 1973, "Tangker2 "Pertamina" Banyak Menyelundup (Selain Oknum2 Bea & Cukai Para Importir Juga Banyak Yang Nakal)".

#### **C. Sumber Jurnal :**

- Inge Hutagalung. 2013. "Dinamika Sistem Pers di Indonesia". *Jurnal Interaksi*. Vol. II No 2: 53-60.
- Satrio Saptohadi. 2011. "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia" *jurnal dinamika hukum*. Vol 11 No 1: 122-133.